

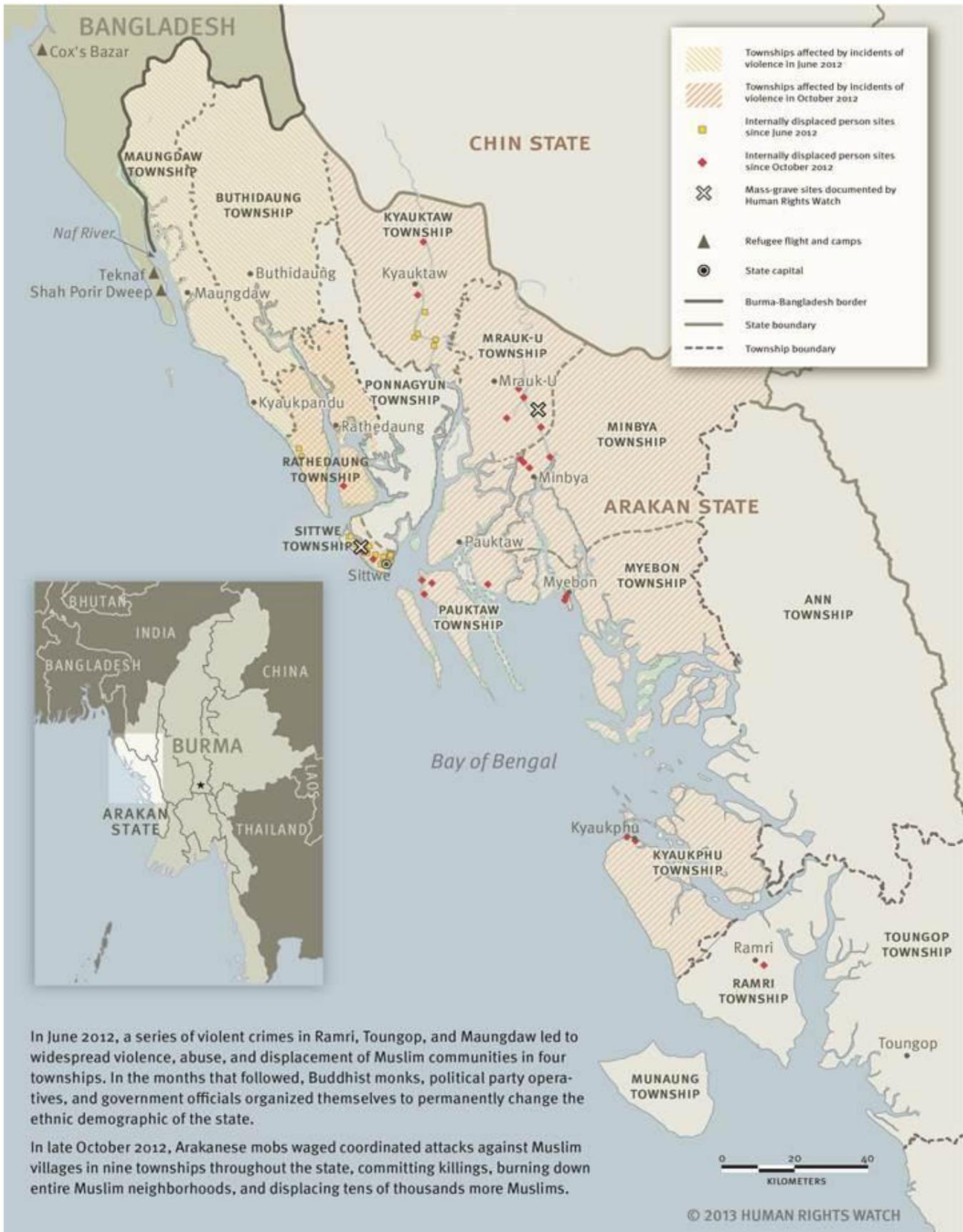


LEMBAGA KAJIAN
SYAMINA
Bekerja Mencegah Kezaliman



JIKA KITA SEORANG ROHINGYA...

*Tidak adakah tempat di bumi ini yang bisa menjadi naungan kami?
Tidak adakah negara yang bisa memberikan tempat kepada kami untuk hidup?
Kamilah satu-satunya manusia yang tidak memiliki hak asasi dan otoritas. Bagi mereka, kami adalah binatang.
Ya Allah, banyak masalah yang datang. Mereka mengambil anak laki-laki dan anak perempuan kami.
Setelah mereka menyiksanya, mereka kemudian menguburkannya secara hidup-hidup bersama dengan 50-60
korban lain...
Duhai saudaraku, tidak adakah cinta bagi kami? Tidak adakah simpatimu untuk kami?
Rakyat kami membusuk, anak-anak kami kelaparan dan kehausan...
-- (Pengungsi Rohingya)--*



In June 2012, a series of violent crimes in Ramri, Toungop, and Maungdaw led to widespread violence, abuse, and displacement of Muslim communities in four townships. In the months that followed, Buddhist monks, political party operatives, and government officials organized themselves to permanently change the ethnic demographic of the state.

In late October 2012, Arakanese mobs waged coordinated attacks against Muslim villages in nine townships throughout the state, committing killings, burning down entire Muslim neighborhoods, and displacing tens of thousands more Muslims.

A. SEJARAH ROHINGYA

Burma (atau sekarang disebut sebagai Myanmar) adalah negara dengan banyak etnis, ras, dan agama. Ia bukanlah negara kelompok tertentu—baik mereka Bamar (Burman), kelompok minoritas Shan, Kachin, Kachin, Kayah, Kayin, Rohingya, Rakhine, Mon, Karen, China, India, atau mana pun itu. Namun, berulang kali realitas ini dilupakan.



Wilayah Arakan di Myanmar, yang berbatasan dengan Bangladesh, ditinggali oleh dua etnis utama, yaitu etnis Muslim Rohingya dan etnis Budha Rakhine. Rakhine adalah kelompok mayoritas, yang banyak tinggal di daerah lembah seperti Lemro, Kaladan, Mayu, dan Cheduba. Sedangkan

Rohingnya adalah kelompok minoritas yang banyak tinggal di wilayah utara Arakan. Kelompok Muslim lain yang tinggal di Arakan adalah Muslim Kaman, yang merupakan pribumi Myanmar dan Muslim Rakhine, yang merupakan keturunan dari pernikahan dengan umat Budha Rakhine. Selain itu, terdapat juga etnis minoritas lain yang tinggal di Arakan, seperti Chin, Mro, Chakma, Khami, Dainet, dan Maramagri, yang banyak tinggal di daerah perbukitan. Pemukiman di Arakan tidak padat, dan sangat jarang kota besar di sana. Kota terbesar di Arakan adalah Sittwe, yang juga merupakan pusat perdagangan. Kota lain yang terkenal adalah Maungdaw, Buthidaung, Rathedaung, Mrauk-U, Kyaukpru, Thandwe, dan Tounggok. Secara umum, penduduk Arakan banyak tinggal di pedesaan, tinggal di lembah, bukit, dan hutan, atau di sekitar pantai Bengal. Arakan adalah wilayah paling kaya akan tabungan minyak dan gas alam di Myanmar.

Awalnya, Arakan bukanlah bagian dari Myanmar maupun Bangladesh, ia adalah wilayah yang terpisah sampai terjadinya invasi yang dilakukan oleh raja Burma yang bernama Bowdawpaya pada tahun 1784. Dinasti terakhir di Arakan berkuasa dari abad ke 15 hingga 18, dan sangat dipengaruhi oleh kultur Islami. Dasar keyakinan Islam, yaitu Kalima, tertulis di seluruh mata uang mereka. Muslim Rohingya adalah penduduk asli wilayah Myanmar yang disebutkan dalam Asiatic Researches volume ke-5 tahun 1799. Sensus yang dilakukan oleh kolonial Inggris pada tahun 1825 M menunjukkan adanya satu orang Muslim untuk setiap dua orang Budha di Arakan. Seluruh konstitusi dan undang-undang kewarganegaraan Myanmar memberikan status pribumi pada seluruh orang yang secara permanen tinggal di Arakan atau di Myanmar sebelum tahun 1825. Muslim Rohingya sebelum tahun 1825 dianggap sebagai ras pribumi yang sah di Myanmar. Namun, hari ini rezim militer Myanmar menuduh etnis Rohingya sebagai imigran gelap asal

Bangladesh dan menyangkal status mereka sebagai warga negara Myanmar.

Sejarah Arakan mengklaim bahwa Kerajaan ini didirikan pada tahun 2666 SM.¹ Selama berabad-abad Arakan pernah menjadi kerajaan yang independen. Ia diperintah oleh berbagai dinasti India dan mereka membuat ibu kota mereka di Dinnawadi (Dhanyavati), Wesali, Pinsa, Parin, Hkril, Launggyet dan Mrohaung di sepanjang sungai Lemro.²

Berdasarkan studi, M.S Collins menyimpulkan bahwa, "Wilayah Arakan Utara sebelum abad ke-8 Masehi dikuasai oleh dinasti Hindu; pada tahun 788 M, dinasti baru yang bernama Chandra, mendirikan kota yang disebut sebagai Wesali; kota ini menjadi pelabuhan dagang yang cukup populer dengan ribuan kapal berlabuh setiap tahun; Raja Chandra adalah seorang penganut Budha, ... wilayah kekuasaannya sampai ke wilayah Chittagong. Baik penguasa maupun rakyatnya adalah keturunan India."³

Selain fakta di atas D.D.E. Hall juga menyebutkan bahwa "etnis Burma tampaknya belum ada di Arakan sampai sekitar akhir abad ke-10 M. Oleh karena dinasti yang berkuasa sebelumnya diperkirakan adalah India, yang memerintah rakyat yang mirip dengan Bengali. Semua ibukota mereka yang dikenal dalam sejarah berada di dekat Akyab saat ini."⁴

Umat Islam Arab pertama kali datang ke Arakan melalui perdagangan selama abad ke-8, dan sejak itu Islam mulai menyebar di wilayah tersebut. Saat

itu, orang-orang Arab sangat aktif dalam melakukan perdagangan di laut.⁵

Sejak saat itu, populasi umat Islam di Arakan semakin meningkat. Secara bertahap mereka membangun hubungan yang sangat baik dengan penduduk lokal dan menikah dengan wanita-wanita lokal. Sudah menjadi tradisi bahwa penduduk asing dan orang-orang yang berkunjung ke Burma dan Arakan tertarik untuk menikah dengan wanita setempat, dengan pemahaman bersama bahwa saat mereka meninggalkan Arakan, anak dan istri mereka tidak dibawa bersama mereka.⁶ Mereka hanya sedikit berbeda dengan orang-orang Arakan asli, yaitu dalam hal agama dan pakaian saja—sebagai pengaruh dari ajaran agama mereka.⁷

Bekerja sama dengan para pedagang dan para pengelana Muslim beberapa ulama Islam memainkan peran penting menyebarkan Islam di Arakan. "Para pedagang Muslim dari Arab, Irak, Persia dan daerah lain di Asia Tengah mulai datang di Chittagong pada abad ke-5, dan beberapa dari mereka sudah menetap di sana untuk tujuan komersial. Bersama dengan mereka adalah para da'i yang menembus jauh ke pedalaman dan menyusuri pantai di Arakan, yang juga memiliki sebuah pemukiman muslim."⁸

Islam mulai memberikan pengaruh dalam politik dan budayanya pada awal abad 15 melalui Raja Naramaikhla. Sekitar tahun 1404, raja Naramaikhla (1404-1434) diusir dari Arakan setelah invasi kerajaan Burma.⁹ Raja Naramaikhla melarikan diri ke Gaur, ibukota Kesultanan Bengal. Ia diterima

¹ A. P. Phayrs, *History of Burma* London, 1883, h. 293-304.

² Ahmed Sharif, *Chaftagramerithias*, lihihas Parishad Patrika, Dhaka 1975. h. 169.

³ M.S.Collis, *Arakan's place in the civitization of the Bay*. *Journal of the Burma Research Sociefy*.

⁴ D.D.E .Hall. *A History of the South East Asia*, New York, 1968, h. 389.

⁵ Muhemmed Abdurahim, *Social & Culturai History of Bengal*, Vol. 1, Karach, 1963, h. 37.

⁶ D.Q.E.Hall, *Studies in Dutch Relations with Arakan*, *Journal of the Burma Research Society*, Vol.XXVI, 1936. h. 6.

⁷ Mr.R.B. Smart, *Burma Gazetteer-Akyab District*, vol. A., Rangoon. 1957, h.14.

⁸ *East Pakistan District Gazetteer-Chittagong*, Government of Pakistan, 1970, h. 110-111.

⁹ Raja Ava, *Mainkhamaung*, mengirimkan anaknya yang bernama Minye Kyaw Swa, untuk menginvasi Arakan.

dengan sangat sopan dan diizinkan untuk tinggal di sana, "di mana ia menjabat sebagai seorang perwira dalam pasukan Ahmed Shah."¹⁰ Raja Naramekhla menghabiskan sebagian besar hidupnya di Bengal, meninggalkan negaranya di tangan kerajaan Burma. Sampai akhirnya pada tahun 1430, ia dikembalikan ke tahta Arakan dengan bantuan tentara Bengal yang dikirim oleh Sultan Muhammad Shah Jalaiuddin. Raja Naramekhla mendirikan sebuah dinasti baru di Arakan yang dikenal sebagai dinasti Mrauk-U, dengan ibukota Mrohaung.¹¹ Konsekuensinya, sejak tahun 1430, kerajaan Arakan menyetorkan upeti kepada kerajaan Bengal dan menggunakan nama Islami serta menggunakan koin yang dikenal sebagai Kalima.¹²

MUSLIM HISTORY IN BURMA



THIS COIN WAS MADE BY THE ROHINGYA PEOPLE OF BURMA IN THE 1500s. ONE SIDE HAS THE MUSLIM PROFESSION OF FAITH: "THERE IS NO GOD BUT ALLAH, AND MUHAMMAD IS HIS MESSENGER".

LOSTISLAMICHISTORY.COM

Karena pengaruh Mohamedan (kepercayaan Islam) cukup kuat, raja-raja Arakan—meskipun beragama Budha—terpengaruh oleh Mohamedan dalam ide-ide mereka. G.E.Hervey menunjukkan bahwa, "Sudah menjadi hal yang biasa bagi raja Arakan, meskipun mereka Budha, untuk menggunakan istilah-istilah Mohamedan dalam nama mereka, bahkan mereka mengeluarkan koin yang disebut

dengan Kalima, sebuah keyakinan dalam tradisi Mohamedan, dalam bahasa Persia."¹³

Praktek ini sudah lazim di kalangan raja-raja Arakan sampai paruh pertama abad ketujuh belas. Hal ini dikarenakan, mereka tidak hanya ingin dianggap sebagai sultan dengan segala haknya, tetapi juga karena ada banyak Muslim yang menjadi rakyat mereka.¹⁴

Jadi pengaruh Muslim di Arakan dapat dikatakan bermula pada tahun 1430, yaitu tahun pengembalian tahta raja Naramekhla. Selama pemerintahannya, terjadi perkembangan yang tak terduga, yang membuka jalan untuk periode dominasi Muslim di tanah Arakan. "Mulai saat itu dan seterusnya hubungan Muslim dengan Arakan menjadi lebih intim, dan selama sekitar dua abad Arakan dipersatukan dalam ikatan persahabatan dengan wilayah Islam. Sebagai akibat peradaban Islam, budaya Arakan juga maju, dan dengan demikian dimulailah 'era keemasan' dalam sejarah Arakan."¹⁵

Selama hampir satu abad, dari sekitar tahun 1580 sampai 1666 M, Chittagong berada di bawah aturan Arakan, dan atas keistimewaan yang dimiliki Arakan dari kerajaan Bengal tersebut, mereka mengirimkan sejumlah rakyatnya, yang beragama Islam, ke Arakan sebagai buruh pertanian. Hal ini menjadi salah satu pemicu meningkatnya populasi umat Islam di Arakan. Apalagi selama abad 16 dan 17, orang-orang Arakan (yang disebut di Bengal sebagai Magh), bekerjasama dengan para pengembara Portugis dikenal sebagai orang yang suka merampas. Mereka merusak dan menghancurkan sebagian besar wilayah selatan dan

¹⁰ Moshe Yegar, *The Muslims of Burma*, Hebrew University, Jerusalem, 1981, h.18.

¹¹ idem

¹² M.Fiobinson and L.A.Shaw, *The Coins and Banknotes of Burma*, England, 1980, h. 44.

¹³ G.E.Hervey, *History of Burma*, London 1925, h. 140

¹⁴ A.P.Phayre, *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, 1846.

¹⁵ M. Siddique Khan, *Muslim Intercourse with Burma, Islamic Culture*, Vol. X. Hydrabad. July, 1936. h. 249.

timur Bengal.¹⁶ Mereka membawa sejumlah besar laki-laki, perempuan, dan anak-anak dari kawasan pantai Bengal sebagai tawanan dan orang-orang Magh (Arakan) mempekerjakan mereka sebagai buruh tani. Kerajaan Arakan sangat jarang penduduknya dan membutuhkan banyak tenaga manusia untuk mengolah lahan pertanian mereka. Orang-orang Arakan mempekerjakan para tawanan ini di sekitar sungai Kuladan sampai Naf. Populasi Kula ini berjumlah sekitar 15% dari total populasi saat itu. A.P. Phayre menyebutkan bahwa "Kula atau Mossalman adalah ras yang benar-benar berbeda. Mereka adalah keturunan dari Bengali."¹⁷

Peristiwa berikutnya yang memicu pertumbuhan populasi umat Islam di Arakan adalah hijrahnya Shah Shuja, saudara dari raja Kerajaan Mughal yang bernama Aurangzeb, ke Arakan pada tahun 1660. Hijrah Shah Shuja ini membawa gelombang imigran Muslim ke kerajaan Arakan dan juga membawa perubahan politik di kerajaan tersebut. Setelah dikalahkan dan dikejar oleh Mir Jumla, Pangeran Shuja melarikan diri dari Bengal ke Arakan bersama dengan keluarga dan tentara-tentara kepercayaannya. Awalnya mereka diterima dengan baik oleh raja Arakan, namun beberapa waktu berikutnya pangeran Shuja dan beberapa tentaranya dibunuh oleh raja Arakan pada tahun 1661.¹⁸ Beberapa orang yang selamat dari pembantaian kemudian bergabung menjadi pengawal raja Arakan sebagai pasukan pemanah yang disebut sebagai Kaman. Dari 1666 sampai 1710 kekuasaan politik Arakan benar-benar di tangan mereka, di mana unit Kaman Muslim memainkan peran yang menentukan dalam penentuan seorang raja. Jumlah mereka semakin

meningkat dari waktu ke waktu atas kedatangan para pendatang baru dari India.¹⁹ Keturunan mereka masih bertahan di Ramree dan beberapa desa dekat Akyab. Bahasa mereka adalah Arakan dan kebiasaan mereka mirip dengan kebiasaan Arakan dalam segala hal kecuali bahwa agama mereka adalah Islam.

Kaum Muslim di Arakan adalah keturunan Muslim Arab, Moor, Persia, Turki, Mughal dan Bengali yang kebanyakan datang sebagai pedagang, prajurit dan dai yang datang melalui jalur darat dan laut. Banyak dari mereka menetap di Arakan dan menikah dengan penduduk lokal yang kemudian menghasilkan keturunan yang dikenal dengan sebutan "Rohingya".

Asal kata Rohingya hingga kini banyak menjadi perdebatan para ahli sejarah. Menurut etimologi, istilah "Rohingya" berasal dari kata Rohang, kata Rohingya untuk negara bagian Arakan. Meskipun beberapa sejarawan Rohingya, seperti Khalilur Rahman, berpendapat bahwa nama Rohingya mungkin berasal dari kata Arab 'Rahma' yang berarti 'belas kasihan.' Mereka melacak kembali sejarah adanya kapal Arab yang karam di abad ke-8. Menurut mereka, setelah kapal karam didekat Pulau Ramree, pedagang Arab diperintahkan untuk dieksekusi oleh raja Arakan. Lalu, mereka berteriak dalam bahasa mereka, 'Rahma'. Oleh karena itu, orang-orang ini disebut 'Raham'. Secara bertahap berubah dari Raham ke Rhohang dan akhirnya ke Rohingya.

Pendapat lain diutarakan oleh Jahiruddin Ahmed dan Nazir Ahmed, mantan Presiden dan Sekretaris Konferensi Muslim Arakan. Mereka berpendapat bahwa mereka bertemu dengan Muslim Thambu Kya di pantai dekat Akyab. Muslim Thambu kya ini tidak mengklaim sebagai Rohingya dan dikenal sebagai Rohingya. Jika memang Rohingya berasal

¹⁶ Untuk lebih detail baca: P. Bemier, "Travels in the Mughal Empire," Delhi, 1968. h.175

¹⁷ A.P. Phayre, Account of Arakan Journal of the Asiatic Society of Bengal, vol. X, 1841, h. 681.

¹⁸ Untuk lebih detail, lihat G.E. Hervey, The fate of Shah Shuja 1661. Journal of the Burma Pesearch Society, part 1. 1922. h. 107-115.

¹⁹ G. E. Harvey, History of Burma, London 1925, h. 148.

dari bahasa Arab “rahma”, tentunya muslim Thambu Kya ini menjadi pihak yang pertama kali disebut sebagai Rohingya. Menurut mereka, Rohingya adalah keturunan penduduk Ruha di Afghanistan.²⁰ Sejarawan lain, MA Chowdhury berpendapat bahwa istilah Roang/Rohang/Roshang berasal dari istilah lama Mrohaung, ibukota Arakan. Penduduk yang tinggal di Rohang/Roshang disebut sebagai Rohingya.

Pada sensus tahun 1911, Rohingya dimasukkan ke dalam etnis India dengan alasan bahwa mereka mempunyai kemiripan lebih dengan India dibandingkan dengan Burma. Sedangkan pada sensus tahun 1922 menyebutkan bahwa Rohingya adalah warga asli Arakan. Anomali sensus tersebut tak diragukan lagi mempengaruhi kontroversi mengenai asal mula Rohingya di Burma. Namun Rohingya mengklaim bahwa secara budaya mereka bukanlah India maupun Burma.

Salah seorang perwira tentara Inggris, yang bertugas di Arakan selama Perang Dunia kedua berkomentar tentang karakter etnis Muslim Arakan sebagai berikut:

"Kelihatannya, mereka cukup tenang, tidak seperti penduduk lain di India dan Burma yang pernah saya lihat. Mereka menyerupai orang Arab dalam hal nama, pakaian dan kebiasaan. Para wanita, terutama yang masih muda, mempunyai sentuhan Arab yang sangat khusus dalam diri mereka."²¹

B. KEKEJAMAN DAN PENINDASAN UMAT BUDHA MYANMAR ATAS ROHINGYA

1. Seruan Pembersihan Etnis

“Orang-orang Arakan memperlakukan kami dengan sangat buruk, menghentikan pasokan makanan kami. Bahkan, salah seorang Arakan mengatakan kepada kami, “Kami akan menghentikan semua makanmu, dan kamu tahu mengapa? Kami melakukannya agar kalian segera pergi dari sini secepatnya dan secara permanen.”²²

Bermula dari kerusuhan Juni 2012, partai politik Arakan, para Biksu, dan warga Arakan membuat pernyataan publik dan mengedarkan berbagai pamflet yang secara langsung atau tidak langsung menyerukan pembersihan etnis Rohingya dari Arakan dan dari Myanmar. Pernyataan dan pamflet tersebut menyangkal keberadaan etnis Rohingya dan menyerukan pembersihan mereka dari negara. Dua kelompok yang paling berpengaruh dalam melakukan aktivitas anti-Rohingya adalah para Biksu lokal (*Sangha*) dan partai lokal Arakan yang cukup kuat, Rakhine Nationalities Development Party (RNDP), sebuah partai yang didirikan pada tahun 2010 oleh kelompok nasionalis Arakan. RNDP saat ini menguasai 18 dari 45 kursi parlemen lokal (hluttaw) dan 14 kursi di parlemen nasional.

Dalam banyak kasus, seruan para biksu dan RNDP untuk mengusir muslim Rohingya dan Kaman disertai dengan perintah pada komunitas Budha untuk mengisolir mereka secara ekonomi dan sosial. Tujuannya adalah untuk menghalangi muslim Rohingya dari aktivitas yang menghasilkan pendapatan, akses ke pasar dan makanan, dan layanan dasar yang penting bagi kelangsungan hidup mereka sehari-hari. Dengan berbagai

²⁰ Zahiruddin Ahmed and NazirAhmed, *The Maghs & the Muslims in Arakan*, h. 5.

²¹ Anthony Irwin, *Burmese Outpost*, London, 1945, h. 22.

²² Human Rights Watch, *All You Can Do is Pray*, April 2013, h. 24, (http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/burma0413_FullForWeb.pdf) (diakses 28 April 2013)

rintangan tersebut, diharapkan mereka akan memutuskan untuk meninggalkan Arakan.

Setelah kerusuhan Juni 2012, para Biksu lokal mengedarkan pamflet yang menyerukan isolasi umat Islam. Salah seorang Biksu bercerita kepada Human Rights Watch bahwa:

*“Pagi ini kami menyebarkan pamflet (di Sittwe), berisi pengumuman yang meminta orang-orang Arakan untuk tidak menjual apapun pada umat Islam atau membeli apapun dari mereka. Poin kedua, orang-orang Arakan tidak boleh berteman dengan umat Islam. Alasannya adalah karena umat Islam mencuri tanah kami, meminum air kami, membunuh rakyat kami. Mereka memakan nasi kami, tinggal di dekat rumah kami. Jadi, kami ingin memisahkan mereka. Kami tidak ingin berhubungan dengan umat Islam sama sekali.”*²³

Aksi ini juga diikuti oleh organisasi lain di Arakan. Pada tanggal 5 Juli 2012, para biksu di kota Rathedaung, 30 km di sebelah utara Sittwe, menyelenggarakan rapat yang menyerukan kepada orang-orang Arakan di Rathedaung untuk tidak memberikan pekerjaan kepada etnis Rohingya, termasuk buruh harian, tukang kayu, tukang batu, dan buruh tani. Rapat tersebut juga menghasilkan rekomendasi bahwa etnis Rohingya tidak boleh dipekerjakan di pemerintahan atau oleh LSM yang beroperasi di kota tersebut, dan seluruh LSM yang memberikan bantuan kepada Rohingya di kota tersebut harus diusir.

“Pernyataan Rathedaung” yang ditandatangani dan dirilis setelah rapat, mendukung seruan untuk melakukan pembersihan etnis. Pernyataan ini menyerukan dibentuknya sebuah aturan untuk mengendalikan angka kelahiran komunitas Muslim Bengali (istilah mereka untuk muslim Rohingya)

²³Human Rights Watch, *All You Can Do is Pray*, April 2013, h. 25, (http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/burma0413_FullForWeb.pdf) (diakses 28 April 2013)

yang tinggal di Arakan. Ia menyarankan relokasi paksa dengan meminta pemerintah untuk “menghapus desa-desa Bengali yang terletak di dekat Universitas Sittwe dan di samping jalur komunikasi di sepanjang Arakan.” Dan ia juga menegaskan penentangan atas segala rencana reintegrasi yang akan meletakkan umat Islam dan Budha hidup berdampingan.”²⁴

Bahkan, keputusan rapat tersebut juga menyerukan adanya milisi rakyat di desa seluruh etnis dan meminta kepada pemerintah untuk mensupply senjata kepada milisi rakyat tersebut.²⁵ “Pernyataan Rathedaung” dikirimkan kepada Presiden Thein Sein, para pimpinan parlemen, dan komisi presidensial yang ditugaskan untuk melakukan investigasi di Arakan.

Anggota *Sangha* Arakan dan RNDP juga menyerukan perubahan demografi di Arakan dan Myanmar keseluruhan, dengan mengeluarkan seluruh etnis Rohingya dari negara tersebut. Thein Tun Aye, perwakiland dari RNDP berkata kepada BBC bahwa seluruh Rohingya adalah imigran ilegal dari Bangladesh dan harus dideportasi. “Ayah dan nenek moyang mereka adalah imigran ilegal, maka kami tidak bisa menerima mereka,” katanya.²⁶ Biksu Ashin Sandarthiri juga membuat pernyataan serupa kepada BBC. Menurutnya, Rohingya tidak punya hak untuk tinggal di Myanmar. “Di dunia ini banyak negara Muslim. Mereka sebaiknya pergi ke sana. Negara Muslim akan merawat mereka. Mereka sebaiknya pergi ke negara yang mempunyai agama yang sama.”²⁷

²⁴Dikutip dari Joseph Allchin, “The Rohingya, Myths and Misinformation,” *Democratic Voice of Burma*, 22 Juni 2012. <http://www.dvb.no/analysis/the-rohingya-myths-and-misinformation/22597> (diakses 5 Juni 2013).

²⁵Euro Burma Office, “Political Monitor 2012,” September 29-October 5, 2012, http://euro-burma.eu/doc/PM_No._30_-_11-10-12.pdf (diakses 5 Juni 2013).

²⁶“Burmese Monks Who Preach Intolerance Against Muslim Rohingyas,” *BBC News*, November 21, 2012,

²⁷ idem

Bahkan, RNDP juga mengancam orang-orang Arakan yang ditemukan berhubungan atau memberikan pertolongan kepada orang-orang Rohingya dalam bentuk apapun. Dua buah foto yang tersebar di internet menunjukkan beberapa orang Arakan yang memberikan makanan kepada orang Rohingya. Orang Arakan tersebut dibelenggu dan dalam foto yang lain, sebuah tulisan di kalungkan di leher mereka bertuliskan “Aku adalah pengkhianat dan Budak Kalar.”²⁸ Dalam foto lainnya, seorang laki-laki yang dibelenggu memakai pakaian wanita di kepalanya, yang merupakan simbol penghinaan bagi laki-laki Arakan. Sebelum foto tersebut muncul, orang-orang Arakan yang bersimpati atas penderitaan etnis Rohingya mengatakan kepada Human Rights Watch bahwa sangat berbahaya bagi mereka untuk pergi ke dekat kamp pengungsian Rohingya, apalagi memberikan bantuan. Mereka takut disiksa oleh komunitas mereka sendiri dan dianggap sebagai “pengkhianat.”²⁹

Tuduhan “Teroris”

Orang-orang Arakan memandang Rohingya sebagai kelompok yang ingin melakukan peperangan anti-Budha di Arakan atau paling tidak ingin menyebarkan pemikiran Islam fundamentalis di seluruh Myanmar. Meskipun Myanmar mempunyai sejarah panjang pemberontakan etnis bersenjata, menurut Martin Smith belum ada kelompok pemberontak dari komunitas Muslim Myanmar yang mengalami kemajuan signifikan.³⁰

Kelompok bersenjata Rohingya, yaitu Rohingya Solidarity Organization (RSO) didirikan di Arakan

²⁸ Kalar atau juga disebut Kula artinya adalah negro atau kuli hitam. Istilah tersebut diberikan oleh orang-orang Burma untuk menghina orang Islam, India, atau keturunan asia selatan lainnya.

²⁹ Human Rights Watch, All You Can Do is Pray, April 2013, h. 27, (http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/burma0413_FullForWeb.pdf) (diakses 28 April 2013)

³⁰ Martin Smith, “Burma: Insurgency and the Politics of Ethnicity,” (Zed Books: London, 1993), h. 194-195.

pada tahun 1982 dan Arakan Rohingya Islamic Front (ARIF) berdiri pada tahun 1987. Namun, Smith dan peneliti lain sepakat bahwa kelompok-kelompok tersebut tidak pernah memberikan ancaman yang



serius pada militer Myanmar, target utama mereka, dan masyarakat Myanmar pada umumnya.³¹

Meski demikian, beberapa orang Arakan yang diwawancarai oleh HRW menyebut Rohingya sebagai “teroris kalar” dan menuduh bahwa setiap masjid di Arakan mempunyai gudang senjata dan setiap imam masjid mempunyai koneksi dengan Al Qaeda.³² Polisi lokal dan Nasaka (pasukan penjaga perbatasan yang terdiri dari militer, polisi, dan pihak imigrasi, dan bea cukai) secara langsung menyebarkan keyakinan tersebut kepada masyarakat setelah kerusuhan Juni 2012.

Salah seorang sesepuh Arakan di Sittwe mengatakan: “Sekitar 50% Muslim Rohingya berpikiran seperti Taliban. Mereka belajar di Madrasah. Ideologi mereka sama dengan Taliban. Polisi tahu akan hal ini dan mendiskusikannya (dengan kami).”³³ Orang Arakan lainnya cerita kepada HRW bahwa pejabat kepolisian bercerita kepadanya bahwa mereka menemukan senjata milik Rohingya disembunyikan di kantor LSM.³⁴

Lebih daripada itu, media yang dikendalikan oleh pemerintah menyalahkan kekerasan di Arakan

³¹ Human Rights Watch, Burma–Rohingya Muslims: Ending a Cycle of Exodus?, September 1996, <http://www.hrw.org/legacy/summaries/s.burma969.html>, h. 14

³² Human Rights Watch, All You Can Do is Pray, April 2013, h. 28

³³ idem

³⁴ idem

sebagai ulah “teroris” Rohingya, dan hal ini menjadi kepercayaan umum masyarakat di Myanmar.³⁵ Situs media online juga mendukung penuh tuduhan tersebut. Sentimen tersebut juga disebar oleh para biksu-biksu populer dalam setiap ceramah mereka.

2. Isolasi Ekonomi

Beberapa penduduk Rohingya menceritakan kepada Human Rights Watch bahwa para biksu Budha mencoba mengisolasi mereka dengan memberikan tekanan kepada penduduk Arakan. Salah seorang nelayan Rohingya yang berasal dari daerah Pauktaw bercerita, “Para biksu datang dan memukul orang-orang Arakan yang secara sembunyi-sembunyi memberikan makanan kepada kami. Mereka menggunakan tongkat bambu dan memukuli mereka di dekat tetangga kami.”³⁶

Penduduk Rohingya lainnya mengatakan, “Ketika (para biksu) berada di desa kami, kami tidak bisa keluar dan tidak ada satu pun yang bisa masuk.” Pada bulan Juni 2012, akbiat dari pernyataan-pernyataan dari asosiasi biksu setempat, salah seorang Rohingya yang terusir bercerita bahwa “sebagian besar orang-orang Arakan kini tidak mau lagi menjual makanan kepada umat Islam.”³⁷

The Economist melaporkan bahwa seorang Arakan dibunuh pada akhir Oktober 2012 silam oleh salah seorang anggota komunitas mereka akibat ketahuan menjual sejumlah besar beras kepada penduduk Rohingya di kota Mrauk-U.”³⁸

³⁵“Bodies Collected in Strife-Torn Burmese Town,” Associated Press, June 11, 2012.

³⁶ Human Rights Watch, “All You Can Do Is Pray”, April 2013, h. 31

(http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/burma0413_FullForWeb.pdf (diakses 28 April 2013)

³⁷ idem

³⁸ Banyan, “War Among the Pagodas,” Economist, 24 Oktober 2012, <http://www.economist.com/blogs/banyan/2012/10/killings-myanmars-rakhine-state> (diakses 12 Juni 2013).

Beberapa orang Rohingya juga menjelaskan tentang usaha RNDP untuk mengisolasi komunitas Muslim di sana.

“Para pemimpin RNDP memberikan perintah kepada rakyatnya. Dalam satu kelompok terdapat 20 orang Arakan dan mereka diperintahkan untuk mengamankan area di sekitar desa kami. Jika ada makanan yang masuk kepada desa etnis Rohingya, mereka akan menghentikannya. ‘Jika ada makanan yang masuk, ambil, hancurkan, dan musnahkan,’ begitu perintah yang saya dengar. Mereka memasang tulisan di pojok jalan di depan toko makanan dengan perintah yang menyatakan bahwa seorang Arakan yang mengambil uang dari Rohingya untuk ditukar dengan nasi, akan dibunuh. Dalam tulisan tersebut juga tercantum bahwa hadiah 100.000 Kyat³⁹ akan diberikan kepada mereka yang berhasil menangkap seorang Arakan yang mensupply makanan kepada Rohingya.”⁴⁰

Salah seorang Rohingya yang terusir yang bekerja untuk memberikan bantuan kepada para pengungsi di IDP (*Internally Displaced People*) mengatakan, “Hidup kami lebih aman dalam pemerintahan militer. Ketika pemerintahan demokratis memperoleh kekuasaan [pada tahun 2011], RNDP mendapatkan kekuasaan di sini, dan sekarang kami menghadapi masalah akan eksistensi kami. RNDP sangat berambisi untuk menghilangkan Islam dari tanah ini, mereka hanya ingin republik Budha Arakan.”⁴¹

3. Pengrusakan Rumah dan Masjid

Setelah kerusuhan Juni 2012 memaksa komunitas Muslim untuk pergi dari Sittwe, otoritas lokal merusak bangunan-bangunan yang tersisa, termasuk rumah dan masjid. Para pejabat pemerintah dan orang-orang Arakan bekerjasama

³⁹ 1 Kyat Myanmar = Rp 10,5

⁴⁰ Idem, h. 32.

⁴¹ Idem, h. 40

untuk merusak bangunan-bangunan tersebut. Salah seorang wanita Rohingya bercerita kepada Human Rights Watch:

“Banyak rumah yang sebenarnya masih berdiri, namun ia dihancurkan oleh pemerintah, bukan orang-orang Arakan. Tidak ada yang salah dengan rumah kami. Ia masih utuh setelah kekerasan. Namun hari berikutnya, teman kami pergi ke tetangga, dan rumah tersebut sudah musnah. Kami mendapatkan foto ini dari tentara (menunjukkan sebuah foto rumah yang berdiri di tengah-tengah debu dan para pejabat pemerintah). Mereka menggunakan buldozer satu atau dua hari setelah pembakaran. Kami mencoba untuk menelepon di rumah tetangga kami dan seorang Arakan menjawabnya. Setelah kami pergi, orang-orang Arakan datang dan mengambil seluruh barang milik kami.”⁴²



Tak hanya rumah, para aparat pemerintah bersama dengan Bksu dan masyarakat Arakan juga menghancurkan masjid. Salah seorang bksu

⁴² Dikutip dari Human Rights Watch, “All You Can Do is Pray,” April 2013.

terkenal di Sittwe berulang kali menegaskan tentang rumor yang berkembang di tengah orang-orang Arakan bahwa masjid di wilayah tersebut adalah markas para militan dimana orang-orang Rohingya menyimpan senjata. Hal ini menjadi justifikasi atas perusakan yang mereka lakukan.

Selain rumah dan masjid, mereka juga menghancurkan madrasah-madrasah di Arakan.

4. Penolakan sebagai Warga Negara

Kondisi etnis Rohingya sangat rapuh karena mereka tidak memiliki status hukum di tanah air mereka dan dianggap sebagai non-warga negara. Nasib mereka menunjukkan bagaimana seseorang tidak mempunyai hak kewarganegaraan di negara mereka sendiri, dan dapat dipaksa keluar dan menjadi pengungsi. UU Kewarganegaraan Burma tahun 1982 telah mengurangi hak Rohingya untuk dianggap sebagai warga negara, meskipun UU Kewarganegaraan 1982 tersebut juga diskriminatif terhadap sebagian besar dari populasi India dan Cina Burma.

UU Kewarganegaraan 1982 membuat sebagian besar Rohingya tidak memenuhi syarat untuk menjadi warga negara Burma.

Sebagian besar kartu Registrasi Nasional (NRCS) yang dikeluarkan untuk Rohingya selama pemerintahan parlementer atau sebelum rezim SLORC / SPDC disita oleh pihak berwenang. Pihak berwenang menggantinya dengan mengeluarkan Kartu Pendaftaran Sementara (KKR) bagi beberapa Rohingya di Maungdaw dan Buthidaung, yang dikenal sebagai “kartu putih”. Kebijakan penggantian ini hanyalah sebuah desain untuk menurunkan status nasional

mereka dan menempatkan mereka dalam ketidakpastian.

Lebih dari satu juta bangsa Rohingya ditolak kewarganegaraannya oleh Myanmar, sebagai buah dari kebijakan diskriminatif yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar. Prospek akan adanya perubahan dari situasi ini pun tidak nampak.⁴³ Rohingnya tidak diakui sebagai salah satu etnis yang berasal dari Myanmar⁴⁴ dan secara sistematis dihilangkan hak sipil, politik, ekonomi, dan sosialnya. Diskriminasi tersebut mencapai puncaknya sejak diterapkannya Undang-undang Kewarganegaraan tahun 1982 yang memberikan kriteria yang cukup ketat untuk bisa mendapatkan status kewarganegaraan penuh. Undang-undang tahun 1982 tersebut membedakan warganegara dalam tiga kategori: warga negara penuh (*full citizens*), warga negara tidak tetap (*associate citizens*), dan warga negara naturalisasi (*naturalised citizens*).⁴⁵

Kewarganegaraan penuh diberikan kepada 135 ras nasional—yang Rohingya tidak masuk di dalamnya—atau kepada mereka yang nenek moyangnya sudah tinggal di negara tersebut sebelum tahun 1823, yaitu sebelum



⁴³Myanmar. The Rohingya Minority: Fundamental Rights Denied, Amnesty International, AI Index ASA 16/005/2004.

⁴⁴Chris Lewa – Conflict, Discrimination and Humanitarian Challenges in Northern Arakan State, Burma Day 2003 Conference, 8 October 2003, Brussels

⁴⁵Pada tahun 1989, pemerintah Myanmar memperkenalkan Kartu Pemeriksaan Warga yang berdasar pada warna (*colour-coded Citizens Scrutiny Cards/CRCs*): kartu *pink* untuk warga negara penuh, biru untuk warga Negara tidak tetap (*associate citizens*) dan hijau untuk warga negara naturalisasi. Rohingnyatidaktermasuk dalam salah satu statuskewarganegaraantersebut, oleh karenanya mereka tidak berhak memperoleh satu kartu pun(Lewa, tanpa tahun, 11).

terjadinya penjajahan Inggris. Kategori ketiga, kewarganegaraan naturalisasi diberikan jika seseorang bisa membuktikan bahwa ia lahir di Myanmar dan orangtuanya telah tinggal di Myanmar sebelum tanggal 4 Januari 1984. Rohingya ditolak kewarganegaraannya karena dianggap tidak memenuhi salah satu dari ketiga syarat di atas.

Diskriminasi, tekanan, dan represi dari negara memaksa muslim Rohingya untuk mengungsi ke Bangladesh beberapa kali dalam dua puluh tahun terakhir ini. Eksodus pertama terjadi pada tahun 1978. Kemudian migrasi besar-besaran juga terjadi pada tahun 1990an. Pada tahun 2003, sekitar 3.000 muslim Rohingya dikembalikan oleh Bangladesh secara paksa ke Myanmar.⁴⁶

Meski demikian, kondisi muslim Rohingya di Arakan tidak juga ada perubahan. Pada awal tahun 2004, lebih dari 15.000 orang masuk ke Bangladesh dari Myanmar. Etnis Rohingya yang masuk ke Bangladesh mengatakan bahwa mereka pergi untuk melarikan diri dari penyiksaan yang dilakukan oleh militer Myanmar dan meminta agar bisa tinggal secara permanen di Bangladesh. Namun, para pejabat Bangladesh menganggap mereka pindah karena faktor ekonomi dan menolak untuk menganggap mereka sebagai pengungsi yang sah.

Kemiskinan yang terjadi di kalangan Rohingya tidak dapat dilepaskan dari konflik vertikal antara pemerintah Myanmar dengan kaum Rohingya yang berakar dari tidak diakuiinya Rohingya sebagai bagian dari warga negara Myanmar. Karena tidak memiliki status kewarganegaraan, kaum muslim Rohingya tidak diberi hak untuk tinggal di teritori

⁴⁶Refugees International, "Lack of Protection Plagues Burma's Rohingya Refugees in Bangladesh", 30 May 2003

14 *Forgotten People: The Rohingyas of Burma*, report prepared by KavitaShukla and Joel Charny for Refugees International, 15 March 2003, <http://www.refugeesinternational.org>.

15 Thousands of Myanmar Muslims flee to Bangladesh, Reuter News Alert, 4 November 2004, <http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/DHA18911.htm>

negara Myanmar. Orang Rohingya telah lama menjadi korban dari junta militer Myanmar yang tidak mengakui mereka sebagai salah satu dari 135 kelompok etnis di Myanmar. Akibatnya, Rohingya dipaksa keluar dari Myanmar sehingga terdapat pendapat umum terjadinya pembersihan etnis yang dilakukan secara sistematis oleh pemerintah Myanmar terhadap orang-orang Rohingya. Karena pembersihan etnis yang terus menerus, populasi Rohingya berkurang secara drastis.

5. Pembatasan Gerakan

Rohingya di Arakan harus secara rutin mengajukan izin untuk meninggalkan desa mereka, meski hanya untuk pergi desa lain di dekatnya. Hal ini berdampak serius pada mata pencaharian dan ketahanan pangan mereka, karena mereka sering tidak mampu untuk mencari pekerjaan di luar desa mereka atau berdagang kecuali mereka memiliki izin resmi dan mendapatkan surat jalan yang harus mereka dapatkan dengan cara membayar. Kebanyakan Rohingya tidak mampu untuk membayar secara teratur atas izin ini. Karena dua pertiga dari Rohingya adalah buruh harian miskin, pembatasan gerakan juga sangat mempengaruhi kemampuan mereka untuk mencari pekerjaan di desa-desa atau kota-kota lainnya.



Pembatasan ini mencegah mereka dari mencari pekerjaan di desa-desa lainnya, berdagang, memancing atau bahkan menghadiri pemakaman seorang kerabat atau mengunjungi dokter. Ketika seorang Rohingya ingin melakukan perjalanan ke sebuah desa di kota yang sama mereka harus mendapatkan surat jalan dari VPDC.⁴⁷ Jika mereka harus pergi lebih jauh, misalnya ke kota lain, mereka harus mengajukan permohonan untuk berbagai jenis izin perjalanan di departemen Imigrasi di kamp Nasaka. Hal ini menjadikan hampir mustahil bagi Rohingya Maungdaw dan Buthidaung untuk bisa berkunjung ke Sittwe, ibukota Arakan. Jika Rohingya dari Sittwe berhasil melakukan perjalanan ke wilayah utara Arakan, sangat sulit bagi mereka untuk kembali ke rumah mereka di Sittwe. Ketidakmampuan untuk bepergian dengan bebas tersebut sangat menghambat kemampuan mereka untuk mencari nafkah, mendapatkan perawatan kesehatan yang layak, dan untuk mencari pendidikan yang lebih tinggi.

Pembatasan pergerakan dikenakan pada semua Rohingya, bukan pada anggota kelompok etnis minoritas lainnya di negara bagian Arakan. Hal ini memberikan dampak yang sangat parah pada kehidupan ribuan Rohingya yang tidak melakukan pelanggaran apapun. Mereka tidak hanya dikibiri haknya untuk bekerja, namun juga hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak.

6. Kerja Paksa

Arakan Utara yang telah berubah menjadi zona militer mengakibatkan peningkatan operasi kerja paksa dan pelanggaran HAM lainnya. Militer secara rutin menyita properti, uang tunai, makanan dan

⁴⁷ Beberapa desa mempunyai seorang VPDC (Village Peace and Development Council). Na Sa Ka biasa mengirimkan perintahnya melalui ketua VPDC, yang adalah seorang Rohingya jika seluruh penduduknya adalah Rohingya, namun jika tidak maka VPDCnya adalah seorang Arakan.

menggunakan metode perekrutan koersif dan kasar untuk mendapatkan pekerja.

Rohingya harus membangun bangunan militer, jalan, jembatan, tanggul, pagoda dan kolam tanpa mendapatkan upah. Penduduk desa harus membajak tanah pertanian dan menanam berbagai sayuran, membangun gedung kamp militer, membawa kayu dari hutan, memanggang batu bata, membersihkan sampah-sampah kamp setiap hari, dan memperbaiki jalan yang rusak di sekitar kamp. Sejak 2 Januari 2005, penduduk desa juga harus membayar pasukan penjaga Na Ka Pa di sepanjang sungai dan pantai setiap hari mulai jam 5 hingga jam 6 sore.

Tuntutan kerja paksa memberikan beban yang sangat besar pada penduduk Rohingya, karena membuat mereka akhirnya tidak mempunyai cukup waktu untuk melakukan pekerjaan mereka sendiri. Sebagai dari mereka yang mampu, terpaksa membayar suap kepada pihak berwenang agar tidak melakukan kerja paksa, namun sebagian besar dari mereka adalah warga miskin yang mau tidak mau harus melakukan kerja paksa, karena mereka tidak mempunyai uang untuk menyuap mereka.

7. Perampasan Tanah, Pengusiran, dan Penghancuran Rumah

Penyitaan tanah dari penduduk Rohingya di negara bagian Rakhine Utara berkaitan dengan pembentukan "desa model", perluasan kamp Na Sa Ka, militer dan kamp polisi, serta untuk membangun perkebunan bagi pasukan keamanan dan juga bagi para pemukim baru.

Sebuah desa model biasanya dibangun untuk 100 rumah untuk 100 keluarga. Setiap keluarga menerima empat hektar tanah, sepasang lembu dan rumah. Desa model ini dibangun di atas tanah yang disita dari penduduk Rohingya. Rumah dan pusat kesehatan dalam desa model tersebut

dibangun dengan kerja paksa yang dilakukan oleh Rohingya. Sebagian besar warga desa model tidak mengolah lahan yang dialokasikan untuk mereka tersebut, dan justru menyewakannya pada para petani Rohingya—yang pada beberapa kasus adalah pemilik asli dari tanah tersebut sebelum disita. Meskipun menurut aturan pemerintah yang berlaku sejak tahun 1997 melarang praktik penyewaan lahan desa model tersebut, namun sampai sekarang praktik tersebut masih berlangsung.⁴⁸

Kebijakan tersebut membuat para penduduk Rohingya kehilangan kesempatan untuk mempertahankan mata pencaharian mereka, karena sawah dan peternakan mereka dirampas. Etnis Rohingya dari desa-desa terdekat sering dipaksa untuk membangun rumah-rumah dan fasilitas lainnya tanpa dibayar. Selain itu, mereka juga harus menyediakan bahan bangunan.

Pembangunan dan perluasan kamp-kamp militer terutama untuk Na Sa Ka juga menyebabkan penyitaan tanah. Selain itu, Na Sa Ka juga menyita lahan Rohingya untuk tujuan komersial, terutama untuk membangun tambak udang dan sawah yang hasilnya disetorkan kepada Na Sa Ka. Rohingya tidak pernah menerima kompensasi sedikit pun atas pekerjaan tersebut, dan mereka dipaksa bekerja di bidang yang sama dengan yang disita dari mereka.

Baru-baru ini populasi Rohingya diusir dan dipaksa untuk membongkar rumah mereka. Mereka memulai dengan 40 rumah. Mereka menangkap delapan belas kepala keluarga dan beberapa wanita yang melakukan protes dan menolak perintah pengusiran tersebut, kemudian mengirim mereka ke penjara. Setelah pembongkaran, pihak pemilik rumah sekeluarga tidak diberi tempat alternatif untuk tinggal. Hal ini memaksa Rohingya menjadi

⁴⁸ Lisbeth Garly Andersen, "Analysis of the livelihood situation of the Muslim population in Northern Rakhine State, 31 Juli 1997, h.11.

semakin tak bertanah, terlantar, untuk akhirnya kelaparan menyeberangi perbatasan ke Bangladesh.

8. Pemerasan dan Pajak yang Sewenang-Wenang

Rohingya di negara bagian Arakan dikenakan pemerasan dan perpajakan yang sewenang-wenang oleh aparat pemerintah. Mulai dari pajak atas pengumpulan kayu bakar dan bambu, biaya untuk pendaftaran kematian dan kelahiran dalam keluarga, peternakan dan pohon buah-buahan, dan bahkan di pertandingan sepak bola.

Pihak berwenang memberlakukan pajak yang sangat tinggi pada makanan dan berbagai produk pertanian Rohingya termasuk beras, makanan pokok mereka. Selain itu, pajak udang, sayur, burung atau ternak (sapi, kerbau, kambing, dan unggas), pajak atap, pajak pembangunan rumah atau pajak perbaikan, dll, dikumpulkan dengan paksa. Setiap Rohingya yang ternaknya melahirkan harus membayar pajak sejumlah tertentu. Setiap kelahiran atau kematian harus dilaporkan dengan membayar biaya.

Sejak Desember 2002, Rohingya harus membayar pajak untuk segalanya, mulai dari memotong kayu di hutan, memancing di sungai dan peternakan hewan di rumah-rumah. Penduduk Rohingya harus membayar pajak tahunan pohon baru, yaitu 2500 kyat per pohon kacang dan kyat 5000 per pohon kelapa. Pemerintah telah menunjuk agen untuk setiap item penting dan memperingatkan Rohingya untuk tidak menjual produk mereka langsung kecuali melalui agen-agen tersebut. Harga ditetapkan oleh Na Sa Ka, yang biasanya sepertiga dari harga pasar. Setiap penjualan ternak harus didaftarkan, dan mereka harus membayar atas pendaftaran tersebut.

Ada beberapa laporan yang menyatakan bahwa banyak Rohingya yang ditangkap atas tuduhan melanggar berbagai peraturan seperti telah

berkunjung ke Bangladesh atau gagal untuk membayar pajak mereka.

9. Pendaftaran Kelahiran dan Kematian dalam Keluarga

Semua rumah tangga Rohingya wajib melaporkan setiap perubahan daftar keluarga kepada pihak berwenang untuk pendaftaran kelahiran dan kematian dalam keluarga. Rohingya dipaksa untuk membayar biaya ke VPDC atau Na Sa Ka. Satu keluarga Rohingya harus membayar 1500 kyat ketika seorang anak baru lahir dan 1000 kyat ketika ada anggota keluarga yang meninggal. Sejak pertengahan tahun 2002, wanita Rohingya yang hamil harus mendaftarkan diri secara pribadi di kamp Na Sa Ka terdekat, yang membutuhkan beberapa jam berjalan kaki dari desa mereka. Wanita tersebut diminta untuk menunjukkan wajah dan perut mereka.

10. Pembatasan Pernikahan

Pihak berwenang di Arakan Utara memperkenalkan peraturan yang mewajibkan Rohingya untuk meminta izin menikah. Pembatasan ini hanya diberlakukan pada umat Islam di daerah ini, dan tidak berlaku atas kelompok minoritas lain yang tinggal di wilayah tersebut. Tidak ada aturan tertulis atas aturan tersebut. Semua sekadar perintah lisan tetapi mereka harus mentaati. Jika tidak patuh, mereka diancam dengan hukuman yang berat.

Dalam beberapa tahun terakhir, pembatasan pernikahan bagi Rohingya lebih diintensifkan. Usia menikah adalah 18 tahun untuk anak perempuan dan 20-25 tahun bagi laki-laki. Bahkan, terkadang pernikahan harus atas persetujuan para perwira Angkatan Darat. Mereka harus mengikuti seluruh prosedur pernikahan yang meliputi tes medis, rekomendasi dari berbagai departemen administrasi dan para komandan militer, termasuk

pasukan perbatasan Na Sa Ka dan lembaga penegak hukum lainnya.

Sejak tahun 2002, pemerintah memberlakukan pajak yang sangat besar bagi Rohingya yang meminta izin untuk menikah. Pihak berwenang juga membatasi jumlah izin yang diberikan setiap tahun. Seringkali, seseorang-orang harus menunggu selama dua hingga tiga tahun untuk mendapatkan izin. Bahkan, meski telah membayar uang dalam jumlah besar, mereka tetap harus pergi ke kamp Na Sa Ka beberapa kali untuk bisa mendapatkan izin tersebut. Secara umum, pasangan Rohingya yang ingin menikah harus membayar sejumlah besar uang ke Na Sa Ka dengan nilai yang bervariasi, mulai dari 50.000 sampai 300.000 Kyat. Biasanya masing-masing pengantin harus membayar dalam jumlah yang sama. Anehnya, setelah pembayaran, izin tidak selalu bisa diberikan.

Pembatasan ini sangat berat bagi orang-orang miskin, yang tidak mampu untuk mendapatkan uang sebesar itu. Dampaknya, di beberapa desa belum ada pernikahan sama sekali selama tahun 2011 karena pembatasan ini.

Ada juga laporan yang menyatakan bahwa banyak pasangan muda melarikan diri ke Bangladesh, karena ini adalah satu-satunya cara bagi mereka untuk menikah. Namun, muncul tantangan berikutnya, setelah di Bangladesh sangat sulit bagi mereka untuk kembali, karena nama mereka sering dihapus dari daftar keluarga mereka oleh pihak berwenang.

11. Pencabutan Hak Pendidikan

Karena Undang-undang Kewarganegaraan Burma tahun 1982, para mahasiswa Rohingya ditolak hak atas pendidikannya. Mereka kesulitan untuk melanjutkan studi yang lebih tinggi, sedangkan kursus profesional juga dilarang atas mereka. Mahasiswa Rohingya yang berhasil dalam tes seleksi

dan mendapat pengakuan formal dalam berbagai lembaga yang berlokasi di Rangoon dan Burma tidak dapat melanjutkan studi mereka karena mereka dilarang untuk melakukan perjalanan. Selama beberapa tahun terakhir sekitar 1500 siswa harus berhenti studi lanjut mereka.

Pada bulan Oktober 2004, lebih dari 165 mahasiswa Rohingya tidak bisa melanjutkan studi saat mereka ditolak dokumen perjalanan untuk pergi ke Sittwe oleh pihak berwenang.

12. Penangkapan yang Sewenang-wenang, Penyiksaan dan Extra-Judicial Killing

Sementara Arakan ditutup dari luar, pihak berwenang Burma telah melakukan penyiksaan dan pembunuhan tanpa henti di Arakan terutama terhadap para pemuda. Lebih dari 100 warga Rohingya tidak bersalah tewas pada tahun 2009 di berbagai belahan Arakan. Ratusan Rohingya dipenjarakan dan mengalami penyiksaan tidak manusiawi. Mereka juga digunakan sebagai perisai manusia dan dipaksa dengan todongan senjata untuk bertindak sebagai penjaga terhadap serangan pemberontak. Kerja paksa yang memperlakukan Rohingya sebagai ternak manusia semakin meningkat. Mereka menjadi sasaran pemukulan parah dan pembunuhan acak.

Perwakilan parlemen asal Rohingya yang terpilih pada pemilu tahun 1990, U Kyaw Min alias Mr Mohamed Shomshul Anwarul Hoque, 55, ditangkap oleh pihak berwenang untuk alasan yang tidak diketahui. Dia adalah anggota komite eksekutif Partai Demokrat Nasional Hak Asasi Manusia (NDPHR), satu-satunya partai politik Rohingya dengan kursi pemenang dalam Pemilu 1990. Dia juga anggota dari Komite Perwakilan Rakyat Parlemen (CRPP). Dia dicitrak dari rumah Rangoon nya oleh agen militer Burma pada tanggal 17 Maret 2005. Agen Polisi Khusus pergi ke rumahnya sekitar tengah malam dan menyuruhnya untuk mengikuti

mereka dan kemudian ia dibawa pergi dengan mobil polisi. Anggota keluarganya tidak mampu melacak keberadaannya.

13. Penyiksaan atas Wanita dan Orang Tua

Wanita Rohingya telah menjadi korban perkosaan, penganiayaan dan penghinaan oleh pasukan keamanan. Mereka tidak diizinkan untuk memakai jilbab, usia pernikahan mereka dibatasi dan diwajibkan melakukan kontrasepsi paksa. Banyak wanita Rohingya dipaksa menikah oleh pasukan keamanan dan kemudian meninggalkan mereka begitu saja. Perempuan Rohingya dipaksa untuk tinggal di kamp-kamp militer dimana mereka menjadi korban pemerkosaan dan penghinaan. Ada banyak contoh kasus dimana perempuan diperkosa di rumah mereka, di depan anak-anak atau orang tua mereka.



Tokoh agama dan tetua Rohingya semakin disiksa dan dilecehkan. Kadang-kadang jenggot mereka dicukur dan dipaksa mengeluarkan fatwa yang mengizinkan praktek-praktek yang tidak islami. Pembangunan masjid dilarang sejak tahun 2000 di negara bagian Arakan, sementara beberapa masjid dan madrasah yang ada justru diruntuhkan oleh Na Sa Ka.

C. BANGLADESH, TETANGGA YANG MENGACUHKAN

Bangladesh merupakan salah satu negara termiskin di dunia. Sebagai negara yang berbatasan langsung, memiliki persamaan agama dan penampilan fisik, Bangladesh adalah tempat yang dipilih oleh Rohingya untuk mencari perlindungan. Kontak antara kaum Rohingya dengan Bengali telah terjadi selama abad ke-15 melalui kerjasama militer, perdagangan dan agama. Selama abad 15 dan 16, terjadi infiltrasi Muslim dari Bengali ke Arakan.⁴⁹

Sejak 1992 Bangladesh telah kedatangan sekitar 280.000 pengungsi Rohingya di dua kamp pengungsi diawasi oleh PBB (Roughneen 2009). Para pengungsi datang dengan membawa pengalaman pahit seperti kekerasan yang mengerikan, kerja paksa, pemerkosaan, eksekusi dan penyiksaan. Sebagai kelompok yang dianiaya dan memiliki identitas Muslim yang sama, pada awalnya Bangladesh menyambut baik kedatangan mereka karena hal ini dilihat sebagai masalah jangka pendek sehingga pemerintah Bangladesh ingin menyelesaikannya melalui perundingan bilateral dengan pemerintah Myanmar. Selain itu, pemerintah Bangladesh melihatnya sebagai kewajiban moral dan tidak berharap akan kedatangan pengungsi Rohingya terus menerus

⁴⁹ Secara periodik, terjadi empat gelombang besar migrasi orang Rohingya ke wilayah Bangladesh. Gelombang pertama, pada tahun 1784 ketika Raja Burma Bodawpaya menginvasi Arakan dan menjadikannya bagian dari Kerajaan Ava (Burma pusat). Pengungsi dari Arakan melarikan diri ke daerah Cox's Bazar. Gelombang kedua, ketika tentara Jepang menyerbu Burma pada tahun 1942 yang memaksa Inggris mundur dan mencari dukungan dari Muslim di Arakan dengan menjanjikan sebuah negara merdeka. Pada tahun 1948 ketika Burma merdeka, Muslim dari Arakan mulai pemberontakan bersenjata menuntut sebuah negara merdeka. Gelombang ketiga pengungsi dari Arakan ke Bangladesh terjadi pada tahun 1978 di bawah Jenderal Ne Win yang melakukan Operasi *Dragon King*. Gelombang keempat adalah yang paling komprehensif, berlangsung selama tahun 1991 dan 1992. SLORC meningkatkan kehadiran militer di negara bagian Arakan utara. Junta membenarkan operasi itu sebagai benteng terhadap gerilyawan ekstrimis Muslim Rohingya (Danish Immigration Service 2011, h. 7-8).

sehingga Bangladesh menyambut baik bantuan UNHCR, Palang Merah dan berbagai lembaga internasional lainnya untuk membantu para pengungsi tersebut. Namun dukungan publik bagi 'kewajiban moral' ini terus menerus merosot, sebagian karena tentangan dari kaum ultranasionalistik Bangladesh yang mencurigai adanya penunggang politik bagi Rohingya oleh kelompok Islam militan, dan sebagian lagi akibat 'keberhasilan' propaganda Myanmar yang mengatakan bahwa Rohingya adalah para pemberontak Islam beraliran jihadis yang membahayakan masa depan Myanmar.



Pengusuran terus menerus oleh rezim militer Myanmar telah mendorong Rohingya memasuki Bangladesh sehingga memperburuk sengketa perbatasan antara Myanmar dan Bangladesh. Sekali pun belum mengarah menjadi perang terbuka, bentrokan perbatasan terulang secara sporadis antara dua negara, di mana Bangladesh terus mencurigai pembangunan militer Myanmar di sepanjang perbatasan darat dan laut Myanmar dengan ditempatkannya stasiun kapal perang angkatan laut yang berdekatan dengan wilayah

sengketa di wilayah Arakan. Situasi ini direspon oleh angkatan laut Bangladesh yang mengirim empat kapal perang ke wilayah Chittagong (Roughneen 2009). Ketegangan yang terus meningkat di perbatasan Myanmar-Bangladesh dapat menjalar menjadi ketegangan di wilayah negara-negara sekitarnya. Selama hal ini belum diatasi, ketegangan ini dapat menciptakan krisis keamanan regional yang dapat memicu perlombaan senjata, apalagi mengingat Myanmar adalah sekutu Cina, sehingga kondisi tersebut secara potensial mampu memancing India untuk bereaksi.

Posisi Bangladesh memang tidak menguntungkan.

Sementara secara internal masih bergelut melawan kemiskinan, Bangladesh dihadapkan pada kompleksnya masalah pengungsi Rohingya yang menuntut kewajiban moral untuk turun tangan dalam mengatasinya. Dengan demikian masalah Rohingya semakin mempersulit masalah kemiskinan yang telah ada di Bangladesh dengan semakin menambah beratnya

beban ekonomi, sosial dan lingkungan, hukum dan ketertiban di negara itu. Frustrasi dan kebencian antara Rohingya dan warga setempat seringkali menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia di kamp-kamp pengungsi di Bangladesh. "Kekerasan seksual sering terjadi pada wanita di kamp pengungsian dan keluarganya. Sedangkan korupsi yang terjadi di semua level penguasa di kamp tersebut, termasuk pejabat pemerintah, personil

polisi dan militer mencegah para pengungsi untuk bisa hidup secara damai dan aman.⁵⁰

Bangladesh mengalami beban berat dalam menerima pengungsi Rohingya. Terdapat sekitar 29.000 pengungsi Rohingya, berada di dua kamp di distrik tenggara Cox's Bazar di Bangladesh. Jumlah ini merupakan sisa dari 250.000 pengungsi yang tiba pada tahun 1991, yang sebagian besar telah dipulangkan. Selain itu, Pemerintah Bangladesh memperkirakan sebesar 200.000 orang dari Burma tinggal di Bangladesh tanpa status hukum, terutama di desa-desa di luar kamp dengan kualitas hidup sangat memprihatinkan.

Membanjirnya pengungsi Rohingya ke Bangladesh menambah parahnya ketegangan hubungan Myanmar-Bangladesh. Pemerintah Bangladesh menampilkan sikap yang makin mengeras terhadap para pengungsi pada tahun 2009 dengan menyatakan bahwa Rohingya adalah pendatang ilegal yang bermukim di bangladsh. Oleh karenanya banyak di antara mereka yang ditangkap dan dikirim ke penjara atas tuduhan infiltrasi ilegal sehingga mereka dipaksa untuk kembali ke Myanmar dalam proses formal "push-back" oleh Bangladesh.⁵¹ Secara tegas pula pemerintah Bangladesh menolak memberi bantuan kepada pengungsi Rohingnya karena masalah Rohingnya merupakan masalah internal Myanmar dan Bangladesh harus melindungi keamanan nasionalnya. Jika Myanmar tidak menganiaya Rohingnya, maka Bangladesh tidak memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan kemanusiaan karena Bangladesh bukan salah satu negara penandatangan Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Apalagi pemerintah Myanmar berusaha untuk memprovokasi Bangladesh dengan

⁵⁰ Rebecca Devitt, "Burma, Bangladesh and the Rohingya: a Failure to Protect?", 6 September 2011. <http://www.e-ir.info/2011/09/06/burma-bangladesh-and-the-rohingya-a-failure-to-protect/> (diakses 13 Juni 2013)

⁵¹ (<http://bdinn.com/articles/bangladesh-keeps-door-firmly-shut-on-rohingya/> diakses 18 Mei 2013

menyatakan bahwa Jamaat e-Islami, salah satu organisasi yang dianggap oleh pemerintah Bangladesh sebagai organisasi ekstrim, memberikan bantuan persenjataan kepada etnis Rohingya di Bangladesh untuk menghasut terjadinya konflik sektarian di Myanmar. Dalam kaitan tersebut Menteri Luar Negeri Bangladesh, Dipu Moni memberikan pernyataan di Parlemen pada tanggal 14 Juni 2012 bahwa,

"Dengan mempertimbangkan kepentingan keamanan nasional, Bangladesh tidak akan mengizinkan satu pun pengungsi Myanmar berada dalam wilayahnya. Situasinya bukanlah bahwa etnis Rohingya tidak mempunyai tempat untuk pergi. Kami sendiri mempunyai banyak masalah. Kami sudah mengizinkan banyak etnis Rohingya untuk tinggal di negara kami, dan kami tidak ingin menambah masalah kami dengan mengizinkan lebih banyak lagi (etnis Rohingya) untuk masuk. Myanmar tidak memaksa warganegaranya untuk meninggalkan negara mereka. Ini adalah konflik sektarian yang negara tidak terlibat di dalamnya. Bahkan, pemerintah Myanmar berusaha untuk mengatasi masalah tersebut."⁵² Selain itu, Dipu Moni juga mengatakan bahwa "Bangladesh tidak akan membiarkan segala aktivitas yang membahayakan negara tetangga."⁵³

⁵² Myanmar claims 'Jamaat link', The Daily Star, 15 Juni 2012. (<http://archive.thedailystar.net/newDesign/news-details.php?nid=238432>) (Diakses 18 Mei 2013)

⁵³ We won't open border for Rohingyas: FM, www.newstoday.com, 15 Juni 2012. http://www.newstoday.com.bd/index.php?option=details&news_id=2315369&date=2012-06-15 (diakses 18 Mei 2013)

Penolakan Bangladesh mendapat kritik dari para aktivis yang memperjuangkan hak-hak pengungsi dengan mengatakan bahwa Bangladesh bertindak melawan hukum humaniter internasional dengan keputusannya mengembalikan pengungsi Rohingya ke Myanmar. Misalnya, *Human Rights Watch* menghimbau Pemerintah Bangladesh untuk memberi keleluasaan pada organisasi-organisasi internasional yang memberikan bantuan kemanusiaan demi menyelamatkan nyawa lebih dari 200.000 Muslim Rohingya di Bangladesh. Pemerintah Bangladesh juga diharapkan membuka perbatasannya untuk orang-orang Rohingya yang melarikan diri dari kekerasan sektarian dan kekerasan oleh pasukan keamanan Burma di Arakan. Tekanan organisasi-organisasi kemanusiaan telah memancing pemerintah Bangladesh untuk merespon lebih tegas. Pada bulan Juli 2012, Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina menolak berbagai bentuk himbauan untuk membantu Rohingnya karena masalah Rohingnya seharusnya menjadi urusan pemerintah Myanmar. Sheikh Hasina mengatakan, *"Bangladesh adalah negara yang sudah sangat padat penduduknya ... Kami tidak bisa menampung beban ini."* (Human Rights Watch 2012). Saat dituduh bertindak tidak manusiawi, Dhaka mengatakan mereka melakukan hal yang benar dengan mengedepankan kepentingan rakyatnya di atas segalanya. Pemerintah Bangladesh mengabaikan seruan para aktivis tersebut dan tetap pada pendiriannya untuk tidak mengizinkan Rohingnya memasuki teritori Bangladesh karena setiap minggu orang-orang berkapal Rohingnya selalu berusaha melarikan diri dari Myanmar.

Mengerasnya sikap pemerintah Bangladesh juga dibuktikan dengan penolakan masuknya bantuan kemanusiaan yang masuk ke kamp atau daerah perbatasan di sekitar Ukhia dan Teknaf.⁵⁴ Bantuan

⁵⁴Terdapat tiga organisasi internasional kemanusiaan utama yang beroperasi membantu pengungsi Rohingnya di perbatasan Myanmar-Bangladesh adalah Doctors Without Borders, Action

kemanusiaan dikhawatirkan akan menciptakan "faktor penarik" untuk Rohingnya lainnya, yang dapat berdampak pada makin tegangnya pasar kerja lokal sehingga Rohingnya akan memperburuk perekonomian dan keamanan nasional.⁵⁵

(K. Mustarom)

ABOUT US

Laporan ini merupakan sebuah publikasi dari Lembaga Kajian Syamina (LKS). LKS merupakan sebuah lembaga kajian independen yang bekerja membantu masyarakat untuk mencegah segala bentuk kezaliman. Publikasi ini didesain untuk dibaca oleh pengambil kebijakan dan dapat diakses oleh semua elemen masyarakat.

Laporan yang terbit sejak tahun 2013 ini merupakan salah satu dari sekian banyak media yang mengajak segenap elemen umat untuk bekerja mencegah kezaliman. Media ini berusaha untuk menjadi corong kebenaran sekaligus mengajak segenap lapisan masyarakat untuk sadar realitas dan peduli terhadap hajat akan keadilan. Isinya mengemukakan gagasan ilmiah dan menitikberatkan pada metode analisis dengan uraian yang lugas dan tujuan yang legal. Pandangan yang tertuang dalam laporan ini merupakan pendapat yang diekspresikan oleh masing-masing penulis. Untuk komentar atau pertanyaan tentang publikasi kami, silakan mengirimkan e-mail ke lk.syamina@gmail.com

Against Hunger dan The British agency Muslim Aid (<http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-19092131>, diakses tanggal 03/08/2012)

⁵⁵ Dhaka aid embargo hurts Bangladesh as much as Rohingya refugees, *The Guardian*, 24 Mei 2012. (<http://www.guardian.co.uk/global-development/poverty-matters/2012/may/24/dhaka-aid-embargo-bangladesh-rohingya>, diakses 18 Mei 2013)